

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

4.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan Kerja sama dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah kesepakatan antar gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan/atau gubernur atau bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, atau yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kebijakan kerjasama Kabupaten Bintan dengan pihak ketiga juga dilakukan dalam rangka pencapaian misi keempat RPJMD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2010–2015 yakni Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik **(good governance)**, demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerja sama antar daerah, yaitu: efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Tahun Anggaran 2015 telah dilaksanakan beberapa bentuk kerjasama antar pemerintah maupun penandatanganan Nota Kesepahaman (Memory of understanding (MOU)) antara lain :

1. Penandatanganan MOU antara kabupaten Bintan dan pemerintah kota Tanjungpinang tentang Komoditas Pangan dan Holtikultura. Bertempat di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (22/12/2015). Mou ini merupakan bentuk kerjasama G to G (Government to Government) agar menguntungkan kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Penandatanganan Mou anantara Badan penelitian dan pengembangan Pertanian (Balitbang) dan Pemerintah kabupaten Bintan. Dalam hal ini Kabuaptan Bintan di pandang cocok untuk jenis tanam Salak Sari Intan, sehingga menjadi peluang bagi Kabupaten Bintan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Diharapkan salak ini nantinya menjadi icon kabupaten Bintan untuk menarik pengunjung wisata yang datang ke Bintan.
3. Kabupaten Bintan dengan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Komunikasi terkait pengadaan akses internet untuk warga pulau penyangga, di Kabupaten bintan terpilih Kecamatan Tambelan sebagai lokasi prioritas Program Pembangunan Desa Broadband Terpadu oleh pemerintah pusat untuk wilayah Kabupaten Bintan.
4. Pemerintah Kabupaten Bintan telah menandatangani MOU Integrasi Jamkesda dengan BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Tanjungpinang Kanwil Kepri, terkait peningkatan pelayanan kesehatan.

4.1.3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program.

4.2. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

4.2.1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam Pasal 363 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah

dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: (a) Daerah lain; (b). pihak ketiga; dan/atau (c). lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

4.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui instansi vertikal misalnya dalam bentuk koordinasi lain dengan instansi vertikal berada di daerah diantaranya adalah kerjasama antara Bappeda Kabupaten Bintan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan dalam rangka pengolahan, analisis data indikator makro dan statistik daerah. Terkait dengan Tramtibmas Pemda Kabupaten Bitan juga bekerjasama dengan Kepolisian, TNI, Kejari, Badan Intelijen Negara, Badan Pertanahan Nasional. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2015 adalah terlaksananya pengolahan, analisis data dan statistik daerah, terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bintan Tahun 2015;
- 2) Forum Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bintan;
- 3) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
- 4) Sosialisasi Peraturan terkait Aktivitas tentang Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing;
- 5) Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan orang Asing, NGO dan Lembaga Asing;
- 6) Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
- 7) Fasilitasi Penanganan Event - Event Kabupaten Bintan.

4.2.3. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bintan (Bappeda) dengan instansi vertikal.
- 2) Upaya-upaya/solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya melalui peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal terkait dalam rangka pencapaian keberhasilan pembangunan.

4.3. Pembinaan Batas Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan

4.3.1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan Batas wilayah dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretris Daerah Kabupaten Bintan yang merupakan Sub SKPD yang baru dibentuk dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan tahun 2014. Bagian Perbatasan melaksanakan kegiatan ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum Badan atau Dinas yang mengurus masalah perbatasan di bentuk oleh Kabupaten Kota. Kegiatan ini lebih mengarah kepada Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan di Perbatasan baik di Perbatasan Negara tetangga maupun

Perbatasan Kabupaten/Kota disekitar Kabupaten Bintan dengan 4 lokasi prioritas (4 Kecamatan).

4.3.2. Realisasi Pelaksanaan dan Kegiatan

1) Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan

- (1) Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.140.745.925,- dan realisasi sebesar Rp.140.650.900,- atau 99,93%. Hasil dari kegiatan ini adalah Tercapainya Program Kegiatan Kementrian/ lembaga dan Provinsi di wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan.
- (2) Kegiatan Koordinasi, Monitoring Evaluasi Wilayah Perbatasan dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.72.503.700,- dan realisasi sebesar Rp.72.455.800,- atau 99,93%. Hasil dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Koodinasi dan Monitioring Evaluasi Wilayah Perbatasan.
- (3) Kegiatan Penyusunan profil potensi Kecamatan Perbatasan dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.73.503.700,- dan realisasi sebesar Rp.72.872.080,- atau 99,14%. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Buku Potensi Kecamatan Perbatasan di Wilayah Perbatasan.
- (4) Kegiatan Pameran terpadu Pengelolaan Wilayah Perbatasan dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan anggaran yang dialokasikan Rp.25.961.475,- dan realisasi sebesar Rp.25.961.475,- atau 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Informasi Perkembangan Pengelolaan dan Pembangunan di kawasan Perbatasan Kabupaten Bintan.

4.3.3. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Permasalahan perbatas Belum adanya Tupoksi bagian pengelolaan perbatasan sehingga kegiatan yang dilaksanakan belum ada acuan untuk dibidangi subbagian yang ada.
- b. Pada kegiatan pameran terpadu pengelolaan wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena kegiatan ini telah dibatalkan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan RI (BNPP) pada Triwulan ke IV bulan November 2015.

2) Permasalahan

Perlu adanya tupoksi yang jelas untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah perbatasan di Kabupaten Bintan sehingga pemerintah Kabupaten Bintan dapat melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan sehingga pemerintah dapat melakukan pembangunan di wilayah perbatasan serta melaksanakan Kebijakan program pembangunan perbatasan, Rencana kebutuhan anggaran, Mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan di Kabupaten Bintan.

4.4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

4.4.1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa daerah Kabupaten Bintan tidak termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana-bencana besar dan masif, seperti Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan, atau Air Bah. Namun kita sebaiknya harus tetap memiliki kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana yang timbul. Berdasarkan kejadian maupun sejarah di Kabupaten Bintan, beberapa potensi bencana yang ada seperti Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan/Belukar/Lahan Perkebunan dan Kekeringan akibat kemarau, asih dalam batas status regional artinya tidak berdampak luas dan masih bisa diatasi ataupun ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya

pemerintah daerah dalam menanggulangi serta mengantisipasi segala potensi bencana yang ada.

4.4.2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Pada tahun 2015 anggaran yang telah dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan sebesar Rp.7.206.592.039,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.4.459.372.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.138.174.011,- (92,79%) dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.747.220.039,- dengan realisasi sebesar Rp 2.695.859.255,- (98,13%). Realisasi anggaran 2015 sampai dengan akhir bulan Desember 2015 mencapai Rp 6.834.033.266,- (94,83%). Sisa anggaran sebesar Rp 372.558.773,- (5.17%) dikembalikan ke Kas Negara.

1) Program Penanggulangan Bencana

- (1) Penyusunan Rencana Dokumen Aksi Penanggulangan Bencana Daerah, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp 124.500.000; dan realisasi sebesar Rp.121.587.635,- atau 97,66%; output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Bencana Alam di Kabupaten Bintan. kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Dokumen tentang Laporan Bencana Alam.
- (2) Monitoring Daerah Bencana dan Rawan Bencana. dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.89.700.000; dan realisasi sebesar Rp.88.268.840; atau 98,40% output dari kegiatan ini adalah Tercapainya Pengurangan Resiko Terhadap Bencana Alam di Kabupaten Bintan. Didalam Penanganan bencana kebakaran di wilayah kabupaten Bintan,
- (3) Penanganan Bencana Kebakaran pada 3 (tiga) UPTD Damkar Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masing-masing UPTD dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-. dan realisasi sebesar Rp.18.200.000,- atau 45.50%. yang berada di Wilayah UPTD Kijang adalah : Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Tambelan. Sedangkan Wilayah UPTD Toapaya adalah Kecamatan Toapaya, Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan

Teluk Bintan. Sedangkan Wilayah UPTD Tanjung Uban adalah : Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Sri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Sebong. Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah Terasilitasinya Kebutuhan Dalam Penanganan Bencana Kebakaran (outcome). Untuk tahun 2015 penanganan kebakaran telah dilaksanakan di 10 Kecamatan. Data dibawah ini menunjukkan kejadian kebakaran yang ditangani oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan dalam Tabel dibawah.

Tabel 6.1 : Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bintan, Tahun 2015

NO.	TANGGAL / JAM		NAMA KECAMATAN	Nama Kelurahan / Desa	Jenis Bencana
1	05 Januari 2015	Pkl. 13,00	Bintan Utara	Tg. Uban Timur	Kebakaran Hutan Semak Belukar
2	08 Januari 2015	Pkl. 11.00	Sri Kuala Lobam	Desa Busung	Angin Buting Beliung
3	12 Januari 2015	Pkl. 10,00	Sri Kuala Lobam	Desa Kuala Simpang	Kebakaran Hutan Semak Belukar
4	14 Januari 2015	Pkl. 13.00	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Hutan Semak Belukar
5	16 Januari 2015	Pkl. 14.50	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Hutan Semak Belukar
6	17 Januari 2015	Pkl. 13.10	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Hutan Semak Belukar
7	18 Januari 2015	Pkl. 19.00	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Hutan Semak Belukar
8	19 Januari 2015	Pkl. 07,00	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran Rumah Type 36
9	22 Januari 2015	Pkl. 15,15	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Hutan Semak Belukar
10	28 Januari 2015	Pkl. 13,30	Bintan Timur	Kel. Sei Lekop	Kebakaran Hutan Semak Belukar
11	30 Januari 2015	Pkl. 18,20	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Hutan Semak Belukar
12	31 Januari 2015	Pkl. 14.00	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran Hutan Semak Belukar
13	31 Januari 2015	Pkl. 18,00	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran Hutan Semak Belukar
14	01 Februari 2015	Pkl. 12.00	Gunung Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran
15	01 Februari 2015	Pkl. 10,20	Bintan Timur	Kel. Sei Lekop	Kebakaran Hutan Semak Belukar
16	01 Februari 2015	Pkl. 14.30	Gunung Kijang	Kawal	Kebakaran Hutan Semak Belukar
17	01 Februari 2015	Pkl. 14.00	Bintan Utara	Tanjung Uban Timur	Kebakaran Hutan Semak Belukar
18	01 Februari 2015	Pkl. 12.00	Bintan Timur	Sei Lekop	Angin Ribut Petir
19	01 Februari 2015	Pkl. 18.30	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Hutan Semak Belukar
20	05 Februari 2015	Pkl. 18,30	Bintan Utara	Tanjung Uban Utar	Kebakaran Semak Belukar
21	06 Februari 2015	Pkl. 13,30	Gunung Kijang	Teluk Bakau	Kebakaran Semak Belukar
22	10 Februari 2015	Pkl. 11.30	Toapaya	Jl. Raya Tg.Uban	Kebakaran Semak Belukar
23	11 Februari 2015	Pkl. 13,30	Teluk Sebong	Desa Sebong Perih	Kebakaran Semak Belukar
24	11 Februari 2015	Pkl. 17.20	Teluk Bintan	Jl. Ceruk Ijuk Perbatasan	Kebakaran Semak Belukar
25	12 Februari 2015	Pkl. 00.45	Bintan Timur	Kp. Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
26	12 Februari 2015	Pkl. 10.50	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
27	12 Februari 2015	Pkl. 13.00	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
28	12 Februari 2015	Pkl. 14.00	Toapaya	Km. 23 Cikolek	Kebakaran Semak Belukar
29	13 Februari 2015	Pkl. 15.50	Gunung Kijang	Km. 29 Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
30	14 Februari 2015	Pkl. 15,00	Seri Kuala Lobam	Busung	Kebakaran Semak Belukar
31	15 Februari 2015	Pkl. 16.00	Bintan Utara	Tanjung Uban Timur	Kebakaran Semak Belukar
32	15 Februari 2015	Pkl. 14.45	Bintan Utara	Jl. Raya Tg. Uban Tpi	Kebakaran Semak Belukar
33	15 Februari 2015	Pkl. 15.40	Gunung Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
34	15 Februari 2015	Pkl. 16.10	Bintan Utara	Jl. Industri Tg. Uban	Kebakaran Semak Belukar
35	15 Februari 2015	Pkl. 20.30	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
36	16 Februari 2015	Pkl. 14.30	Bintan Timur	Kijang Kota	Kebakaran Semak Belukar
37	17 Februari 2015	Pkl. 09.30	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
38	17 Februari 2015	Pkl. 11.30	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
39	18 Februari 2015	Pkl. 13.35	Seri Kuala Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran Semak Belukar
40	18 Februari 2015	Pkl. 15.00	Bintan Timur	Jl. Kalang Batang	Kebakaran Semak Belukar
41	22 Februari 2015	Pkl. 11.30	Toapaya	Jl. Km. 30 Toapaya	Kebakaran Tangki Minyak
42	22 Februari 2015	Pkl. 13.00	Bintan Utara	Drsa Lancang Kuning	Kebakaran Semak Belukar
43	22 Februari 2015	Pkl. 13.00	Gunung Kijang	Km. 30 Kawal	Kebakaran Semak Belukar
44	22 Februari 2015	Pkl. 15.00	Bintan Utara	Tg. Uban Timur	Kebakaran Semak Belukar

45	22 Februari 2015	Pkl. 19.20	Bintan Utara	Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
46	23 Februari 2015	Pkl. 15.10	Gunung Kijang	Kel. Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
47	24 Februari 2015	Pkl. 15.30	Toapaya	Jl. Lintas Barat Stai	Kebakaran Semak Belukar
48	24 Februari 2015	Pkl. 14.05	Toapaya	Km. 26 Kec. Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
49	27 Februari 2015	Pkl. 14.00	Teluk Bintan	Kantor Satpol Bintan	Kebakaran Semak Belukar
50	27 Februari 2015	Pkl. 21.30	Toapaya	Km. 20 Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
51	02 Maret 2015	Pkl. 13.40	Teluk Bintan	Sapol Pp Bintan Buyu	Kebakaran Semak Belukar
52	02 Maret 2015	Pkl. 14.30	Bintan Utara	Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
53	03 Maret 2015	Pkl. 14.10	Toapaya	Kantor Camat Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
54	03 Maret 2015	Pkl. 15.00	Bintan Utara	Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
55	04 Maret 2015	Pkl. 09.00	Bintan Utara	Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
56	04 Maret 2015	Pkl. 11.30	Gunung Kijang	Km. 25 Kawal	Kebakaran Semak Belukar
57	05 Maret 2015	Pkl. 16.30	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Kebakaran Semak Belukar
58	05 Maret 2015	Pkl. 17.20	Gunung Kijang	Km. 23 Kawal	Kebakaran Semak Belukar
59	06 Maret 2015	Pkl. 13.00	Teluk Sebong	Kp. Harapan Sei Kecil	Kebakaran Semak Belukar
60	06 Maret 2015	Pkl. 14.00	Toapaya	Km. 20 Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
61	09 Maret 2015	Pkl. 15.50	Teluk Bintan	Km. 42 Bintan Buyu	Kebakaran Semak Belukar
62	10 Maret 2015	Pkl. 14.45	Seri Kuala Lobam	Desa Busung	Kebakaran Semak Belukar
63	11 Maret 2015	Pkl. 12.00	Bintan Utara	Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
64	14 Maret 2015	Pkl. 15.40	Gunung Kijang	Km. 31 Gunung Kijang	Kebakaran Semak Belukar
65	16 Maret 2015	Pkl. 15.00	Seri Kuala Lobam	Kel. Tg. Permai	Kebakaran Semak Belukar
66	17 Maret 2015	Pkl. 15.10	Toapaya	Km. 31 Toapaya	Kebakaran Hutan Belukar
67	17 Maret 2015	Pkl. 16.00	Bintan Utara	Tanjung Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
68	18 Maret 2015	Pkl. 13.00	Teluk Sebong	Desa Sri Bintan	Kebakaran Semak Belukar
69	19 Maret 2015	Pkl. 14.00	Teluk Sebong	Desa Sri Bintan	Kebakaran Semak Belukar
70	20 Maret 2015	Pkl. 18.00	Teluk Sebong	Jl. Manggis Sei Kecil	Kebakaran Semak Belukar
71	23 Maret 2015	Pkl. 10.30	Seri Kuala Lobam	Kel. Tanjung Permai	Kebakaran Semak Belukar
72	24 Maret 2015	Pkl. 11.00	Bintan Utara	Tanjung Uban Utara	Kebakaran Semak Belukar
73	26 Maret 2015	Pkl. 11.30	Gunung Kijang	Ktr. Polsek Gn. Kijang	Kebakaran Semak Belukar
74	27 Maret 2015	Pkl. 08.10	Toapaya	Km. 16 Toapaya	Kebakaran Semak Belukar
75	30 Maret 2015	Pkl. 15.30	Gunung Kijang	Jl. Kalang Batang	Kebakaran Semak Belukar
76	08 April 2015	Pkl. 11.30	Toapaya	Km. 19 Gesek	Kebakaran Semak Belukar
77	12 April 2015	Pkl. 16.10	Gunung Kijang	Km. 32 Kawal	Kebakaran Semak Belukar
78	13 April 2015	Pkl. 20.00	Gunung Kijang	Km. 32 Kawal	Kebakaran Semak Belukar
79	13 April 2015	Pkl. 13.00	Bintan Utara	Desa Lancang Kuning	Kebakaran Semak Belukar
80	16 April 2015	Pkl. 11.30	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran Semak Belukar
81	16 April 2015	Pkl. 11.30	Teluk Bintan	Km. 42 Sri Bintan	Kebakaran Semak Belukar
82	29 Juni 2015	Pkl. 11.45	Gunung Kijang	Ktr Camat Gn. Kijang	Kebakaran Semak Belukar
83	07 Juli 2015	Pkl. 17.35	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
84	18 Juli 2015	Pkl. 14.00	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran Semak Belukar
85	20 Juli 2015	Pkl. 18.00	Bintan Utara	Jl. Mekar Sari Tg. Uban	Kebakaran Semak Belukar
86	22 Juli 2015	Pkl. 09.00	Teluk Sebong	Drsa Sri Bintan	Kebakaran Semak Belukar
87	22 Juli 2015	Pkl. 13.35	Bintan Timur	Kp. Kelong Enam	Kebakaran Rumah Tinggal
88	23 Juli 2015	Pkl. 11.00	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
89	24 Juli 2015	Pkl. 14.50	Bintan Timur	Kel Sei Enam	Kebakaran Semak Belukar
90	31 Juli 2015	Pkl. 06.50	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Kota	Kebakaran Ruko 2 Lantai
91	02 Agustus 2015	Pkl. 11.00	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Utara	Kebakaran Semak Belukar
92	03 Agustus 2015	Pkl. 08.00	Bintan Utara	Desa Lancang Kuning	Angin Putting Beliang
93	12 Agustus 2015	Pkl. 02.15	Bintan Utara	Kel Tg Uban	Angin Putting Beliang
94	16 Agustus 2015	Pkl. 01.00	Bintan Timur	Kel. Sei Enam	Angin Putting Beliang
95	17 Agustus 2015	Pkl. 14.00	Teluk Sebong	Kel. Kota Baru	Kebakaran Semak Belukar
96	17 Agustus 2015	Pkl. 14.30	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
97	23 Agustus 2015	Pkl. 13.45	Toapaya	Km. 25 Jl. Uban Lama	Kebakaran Semak Belukar
98	23 Agustus 2015	Pkl. 16.30	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
99	29 Agustus 2015	Pkl. 13.00	Bintan Timur	Kel. Sei Lekop	Kebakaran Semak Belukar
100	29 Agustus 2015	Pkl. 18.45	Seri Kuala Lobam	Perum Lobam Bestari	Kebakaran Semak Belukar
101	30 Agustus 2015	Pkl. 11.00	Seri Kuala Lobam	Kp. Teluk Sasah	Kebakaran Semak Belukar
102	30 Agustus 2015	Pkl. 16.00	Seri Kuala Lobam	Desa Kuala Sempang	Kebakaran Semak Belukar
103	03 Sept 2015	Pkl. 11.00	Bintan Utara	Kel Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
104	06 Sept 2015	Pkl. 10.00	Bintan Utara	Tanjung Uban Timur	Kebakaran Semak Belukar
105	07 Sept 2015	Pkl. 1.300	Bintan Timur	Kel. Sei Lekop	Kebakaran Semak Belukar
106	07 Sept 2015	Pkl. 15.00	Gunung Kijang	Jl. Wisata Bahari Km. 23	Kebakaran Kebun Karet
107	08 Sept 2015	Pkl. 13.00	Teluk Bintan	Bintan Buyu	Kebakaran 1 Unit Mobil Dinas
108	08 Sept 2015	Pkl. 11.00	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
109	08 Sept 2015	Pkl. 14.30	Gunung Kijang	Jl. Wisata Bahari Km. 28	Kebakaran Semak Belukar
110	08 Sept 2015	Pkl. 16.00	Gunung Kijang	Jl. Wisata Bahari Km. 20	Kebakaran Semak Belukar
111	09 Sept 2015	Pkl. 15.00	Seri Kuala Lobam	Desa Teluk Sasah	Angin Putting Beliang

112	11 Sept 2015	Pkl. 11.00	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
113	11 Sept 2015	Pkl. 14.00	Bintan Timur	Kel. Sei Lekop	Kebakaran Semak Belukar
114	13 Sept 2015	Pkl. 11.30	Toapaya	Simpang Pasar Tani	Kebakaran Semak Belukar
115	14 Sept 2015	Pkl. 13.15	Toapaya	Lintas Barat Km. 16	Kebakaran Hutan
116	19 Sept 2015	Pkl. 18.00	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
117	20 Sept 2015	Pkl. 11.00	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Semak Belukar
118	21 Sept 2015	Pkl. 10.00	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Hutan Lindung
119	23 Sept 2015	Pkl. 14.30	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Semak Belukar
120	24 Sept 2015	Pkl. 14.30	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Semak Belukar
121	25 Sept 2015	Pkl. 14.35	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
122	25 Sept 2015	Pkl. 18.45	Gunung Kijang	Km. 56 Berakit	Kebakaran Semak Belukar
123	26 Sept 2015	Pkl. 12.50	Toapaya	Jl. Ceruk Ijuk	Kebakaran Hutan
124	27 Sept 2015	Pkl. 15.00	Bintan Utara	Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
125	27 Sept 2015	Pkl. 17.30	Bintan Utara	Tg. Uban Selatan	Kebakaran Semak Belukar
126	02 Oktober 2015	Pkl. 14.45	Bintan Timur	Kel. Kijang Kota	Kebakaran Speed Boat Patroli
127	15 Oktober 2015	Pkl. 15.00	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
128	15 Oktober 2015	Pkl. 12.30	Seri Kuala Lobam	Belakang Rsud Busung	Kebakaran Semak Belukar
129	16 Oktober 2015	Pkl. 15.10	Gunung Kijang	Belakang Hotel Nikoi	Kebakaran Semak Belukar
130	17 Oktober 2015	Pkl. 20.00	Teluk Sebong	Kp. Bangun Mulyo	Kebakaran Semak Belukar
131	17 Oktober 2015	Pkl. 08.00	Bintan Timur	Kel. Gunung Lengkuas	Kebakaran Semak Belukar
132	21 Oktober 2015	Pkl. 01.10	Gunung Kijang	Jl. Wisata Bahari	Kebakaran Semak Belukar
133	22 Oktober 2015	Pkl. 11.00	Bintan Utara	Kel. Tg. Uban Timur	Kebakaran Semak Belukar

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015

2) Program Mitigasi Bencana, hanya 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- (1) Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Keselamatan di Laut/Pantai dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp.145.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.144.865.100,- atau 99,91% Output dari kegiatan ini adalah Telaksananya Penanganan dan Penanggulangan Bencana Keselamatan Dilaut/ Pantai oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) menargetkan tersedianya 20 orang Tim Reaksi Cepat (TRC), yaitu petugas yang terlatih dalam penanggulangan bencana keselamatan di laut/pantai. Hasil yang diharapkan dari Kegiatan ini adalah Terciptanya Kondisi Keamana dan Keselamatan Dilaut/ Pantai yang Kondusif Bagi Pengunjung/ Masyarakat. Realisasi kegiatan ini 100%.
- (2) Kegiatan Pelatihan Penanganan Kedaruratan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp.140.300.000,- dan realisasi sebesar Rp.137.936.760,- atau 98.32% Output dari Kegiatan ini adalah Telaksananya Pelatihan Penangan Kedaruratan Bencana Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan, Hasil yang diharapkan dari Kegiatan adalah Terlatihnya Masyarakat (Relawan) Terhadap Kedaruratan Bencana, yang menargetkan tersedianyan 40 orang Relawan dalam penanggulangan bencana di kabupaten bintan.

- (3) Kegiatan Forum Koordinasi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp. 74.630.000,- dan realisasi sebesar Rp. 72.089.500,- atau 96,60% Output dari Kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi atau sosialisasi ke masyarakat di Kecamatan, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya tem Forum komunikasi Kesiapsiagaan setiap Kecamatan.

Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Bintan dimasa yang akan datang serta sumberdaya yang tersedia, maka beberapa isu strategis yang terkait dengan bidang kebencanaan dalam wilayah Kabupaten Bintan adalah

- a. Belum adanya perencanaan bersama yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana antar lembaga-lembaga terkait. Dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana belum dilaksanakan terintegrasi satu dengan yang lainnya, masing-masing lembaga menyusun sendiri-sendiri sehingga seringkali tumpang tindih dan tidak efektif dalam penanganan bencana dan penganggarnya masih tersebar di SKPD.
- b. Belum memadainya peraturan kebencanaan sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana; Sebagai SKPD yang baru terbentuk pada tahun 2012, maka peraturan teknis dan operasional kebencanaan untuk implementasi di lapangan belum tersedia sehingga masih menggunakan peraturan umum yang belum tentu sesuai dengan kondisi di Kabupaten Bintan.
- c. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait dalam penanggulangan bencana di daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan yang berfungsi sebagai kordinator dalam penanganan penanggulangan bencana belum berperan secara optimal mengingat keterbatasan yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.

Adapun Solusi yang dilaksanakan adalah :

- a. Perlu adanya perencanaan bersama yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana antar lembaga-lembaga terkait. Dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi satu dengan yang lain (tidak tumpang tindih) sehingga efektif dalam penanganan bencana dan penganggarnya;
- b. Perlu peraturan teknis dan operasional kebencanaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanganan kebencanaan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Bintan;
- c. Mengingat BPBD berfungsi sebagai koordinator, maka perlu optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait dan peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana agar dapat berperan secara optimal. Penanganan bencana mesti ditujukan pada aspek manajemen bencana secara keseluruhan.

4.5. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kabupaten Bintan merupakan 1 dari 4 wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas di Indonesia bersama Batam, Karimun dan Sabang di Nangroe Aceh Darussalam, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2007 dan peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2011. Adapun kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Free Trade Zone Bintan adalah sebagai berikut:

1. Bintan Bagian Utara seluas 58, 750 hektar diperuntukkan sebagai kegiatan pariwisata, industri, pertanian dan perdagangan;
2. Industri Maritim Bintan Timur, seluas 812 hektar diperuntukkan sebagai kegiatan industri maritim dan perdagangan;
3. Industri Galang Batang, seluas 1.775 hektar diperuntukkan sebagai kegiatan industri modern pendukung industry, perdagangan dan resort;
4. Pulau Anak Lobam, seluas 678 hektar.

Badan Pengusahaan Kawasan Bintan wilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Dewan Kawasan PBPB Bintan nomor : 1 tahun 2008 tanggal 23 Agustus 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Bintan/ Wilayah Kabupaten Bintan dan Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang. Badan

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Badan Pengusahaan Kawasan) dibentuk sebagai manejer yang menjalankan seluruh fungsi manajemen dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dinyatakan bahwa tugas Badan Pengusahaan Kawasan adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dengan demikian ada 3 tugas dan wewenang badan pengusahaan yaitu pengelolaan, pengembangan dan pembangunan.

a. Dasar Hukum

- 1) UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- 2) UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2007 menjadi Undang –Undang;
- 3) PP No. 46, 47 dan 48 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;
- 4) Keputusan Presiden No. 9, 10 dan 11 Tahun 2007 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun;
- 5) Keputusan Ketua Dewan Kawasan tentang Badan Pengusahaan KPBPB Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang;
- 6) Kep. Menhub No. 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada KPBPB Batam, Bintan dan Karimun;
- 7) PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPBPB;
- 8) Selanjutnya dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Bintan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau selaku Ketua Dewan Kawasan dengan Nomor : Kpts / 04 / DK / VIII / 2008 tanggal 23 Agustus 2008;

- 9) Dokumen SK tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan bintan wilayah Kabupaten Bintan;
- 10) Keputusan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Tentang KPBPB Bintan;
- 11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 Tanggal 7 Mei 2008 Tentang Badan Pengusahaan KPBPB BintanKeputusan Ketua Dewan KPBPB Bintan Nomor : Kpts/04/DK/AVII/2008Tanggal 23 Agustus 2008 Tentang Penetapan Personel BP KPBPB Bintan;
- 12) Peraturan Ketua Dewan Kawasan PBPB Bintan Nomor : 01 Tahun 2008 Tanggal 23 Agustus 2008 tentang BP KPBPB Bintan;
- 13) Keputusan Ketua Dewan KPBPB Bintan Nomor : Kpts/02/DK/III/2009 Tanggal 30 maret 2009 Tentang Penetapan Personel BP KPBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang;
- 14) Keputusan Ketua Dewan KPBPB BBK Nomor : Kpts.10/DK/II/2010 Tanggal5 Februari 2010 Tentang Tata Kerja Dewan Kawasan;
- 15) Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah KabupatenBintan Nomor : Kpts 001/BPK-WB/II/2009 Tanggal 18 Februari 2009 Tentang Penunjukan Pejabat pada bidang-bidang BPKBPB Bintan Wilayah Kabupaten Bintan;
- 16) Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah KabupatenBintan Nomor : Kpts 002/BPK-WB/IV/2009 Tanggal 15 April 2009 Tentang Penunjukan Personil dan Uraian Tugas pada BPK Bintan Wilayah Kabupaten Bintan;
- 17) Keputusan Bupati Bintan Nomor : 273/V/2011 18 Mei 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Dilingkungan Pemkab Bintan sebagai Personil pada BPK Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011.

b. Program dan Kegiatan

Adapun Kegiatan jangka pendek dan menengah yang telah dilaksanakan adalah :

- 1) Inventarisasi seluruh wilayah yang termasuk dalam kawasan FTZ (Bintan Bagian Utara, Anak Lobam, Galang Batang dan Maritim Bintan Timur) sehingga diketahui luasan wilayah yang belum termanfaatkan. Untuk saat ini inventarisasi lahan, sudah dilaksanakan pada dua kawasan yaitu Kawasan FTZ Galang Batang dan Kawasan FTZ Industri Maritim Bintan Timur;
- 2) Melakukan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kawasan Industri Maritim Bintan Timur;
- 3) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan PBPB Bintan;
- 4) DED Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sei-Kolak Kijang;
- 5) Menyusun Tata Ruang untuk Kawasan FTZ Galang Batang;
- 6) Membuat titik-titik batas sementara kawasan yang termasuk dalam wilayah FTZ;
- 7) Sosialisasi kepada dunia usaha / investor dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Baleho disetiap kawasan dengan ukuran yang memadai);
- 8) Melengkapi fasilitas-fasilitas pelabuhan yang belum memadai pada pelabuhan resmi (exit dan entry point) pada kawasan FTZ;
- 9) Menyusun Tata Ruang untuk Kawasan FTZ Galang Batang.

Pada BP Bintan Wilayah Kabupaten Bintan telah memiliki aset berupa Jalan yakni di Jalan Korindo Kijang sepanjang 13,7 Km Kecamatan Bintan Timur dan Jalan E kang Penaga sepanjang 2,825 Km di Kecamatan Teluk Bintan sehingga total keseluruhan adalah 16,52 Km.

c. Perkembangan Investasi

Tabel 6.2 : Perkembangan Investasi

2014	146 (PMA)	5589	32	13.448	284	981.22 US\$	807.40 US\$
	9 (PMDN)	377	-	1.095	-	Rp. 536.407.654.031	Rp.211.980.000.000
2015	158 (PMA)	10.911	61	7.702	146	921.260 US\$	810.538 US\$
	17 (PMDN)	429	-	1.095	-	Rp. 565.867.654.031	Rp. 211.980.000.000

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

Adanya penambahan data perusahaan baik PMA dan PMDN hingga Desember 2015 yang belum di akomodir oleh BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, data tersebut didapatkan dari Badan Koordinasi Penanaman

Modal RI yang selama ini menangani sejumlah izin Perusahaan Modal Asing (PMA). Dengan hal tersebut maka terjadi penambahan perusahaan yang cukup signifikan di kawasan FTZ Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Investasi yang masuk di kawasan FTZ Bintan wilayah Kabupaten Bintan dari Januari sampai dengan Desember 2015 adalah 12 PMA dengan rencana investasi sebesar US\$ 313.940.000 dengan membutuhkan Tenaga Kerja Indonesia adalah 1.130 Orang. Sehingga total Perusahaan PMA yang ada sampai dengan Desember 2015 adalah 158 PMA dengan membutuhkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 10.911 Orang dengan rencana investasi 921.260 US\$ (satuan Ribu).

Tabel 6.3 : Jumlah Perusahaan PMA yang Berinvestasi di Bintan

1	PT LEISURE DEVELOPMENT BINTAN	KAWASAN PARIWISATA LAGOI	JL TELUK BEREMBANG, LAGUNA BINTAN RESORTS LAGOI	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	6	SINGAPURA	69.900.000	14/01/2015
2	PT THE HAVEN INTERNATIONAL	LAGOI BAY, BINTAN BEACH INTERNATIONAL RESORT, LAGOI	JL PERMAISURI NO 5 RT.001 RW 003 TG. UBAN	JASA AKOMODASI DAN REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	200	GABUNGAN NEGARA SINGAPURA, INGGRIS	82.000.000	23/01/2015
3	PT IZUMI ECO RESORT	DESA BERAKIT KEC TELUK SEBONG	JL PERMAISURI NO 5 RT.001 RW 003 TG. UBAN	HOTELBINTA NG TIGA	30	GABUNGAN NEGARA SINGAPURA, AUSTRALIA	1.320.000	31/03/2015
4	PT INDERA SEGERA JN 9 BINTAN	BINTAN LAGOON RESORT, KAWASAN PARIWISATA LAGOI KECAMATAN TELUK SEBONG	GEDUNG EQUITY TOWER LT 35, SCBD LOT 9JL,JEND SUDIRMAN KAV.52-53 JAKARTA	JASA KONSULTAN PARIWISATA	10	MALAYSIA	1.200.000	07/04/2015
5	PT LEISURE DEVELOPMENT BINTAN	KAWASAN PARIWISATA LAGOI	JL TELUK BEREMBANG, LAGUNA BINTAN RESORTS LAGOI	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	6	SINGAPURA	69.900.000	14/01/2015
6	PT THE HAVEN INTERNATIONAL	LAGOI BAY, BINTAN BEACH INTERNATIONAL RESORT, LAGOI	JL PERMAISURI NO 5 RT.001 RW 003 TG. UBAN	JASA AKOMODASI DAN REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	200	GABUNGAN NEGARA SINGAPURA, INGGRIS	82.000.000	23/01/2015
7	PT IZUMI ECO RESORT	DESA BERAKIT KEC TELUK SEBONG	JL PERMAISURI NO 5 RT.001 RW 003 TG. UBAN	HOTELBINTA NG TIGA	30	GABUNGAN NEGARA SINGAPURA, AUSTRALIA	1.320.000	31/03/2015

8	PT INDERA SEGERA JN 9 BINTAN	BINTAN LAGOON RESORT, KAWASAN PARIWISATA LAGOI KECAMATAN TELUK SEBONG	GEDUNG EQUITY TOWER LT 35, SCBD LOT 9JL,JEND SUDIRMAN KAV.52-53 JAKARTA	JASA KONSULTAN PARIWISATA	10	MALAYSIA	1.200.000	07/04/2015
9	PT. ONDA BATAM INDONESIA	JL NUSANTARA KM 23 KEC BINTAN TIMUR (KAWASAN FTZ BINTAN TIMUR)	KOMP RUKO MAHKOTA RAYA BLOK A NO 12 KEL. TELUK TERING KEC BATAM KOTA	JASA INDUSTRI PENGKERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	51	GABUNGAN NEGARA SINGAPURA, INDONESIA	1.000.000	23/03/2015
10	PT INDO MBR MARINE COATING SERVICES	JL NUSANTARA KM 23 KEC BINTAN TIMUR (KAWASAN FTZ BINTAN TIMUR)	KOMP RUKO PLUTO I-08, TANJUNG UNCANG – BATAM	JASA INDUSTRI PENGKERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	350	MALAYSIA	1.200.000	13/02/2015
11	PT ALLBEST MARINE	JL NUSANTARA KM 23 KEC BINTAN TIMUR (KAWASAN FTZ BINTAN TIMUR)	KAWASAN BINTANG INDUSTRI II LOT D NO 56 TANJUNG UNCANG - BATAM	JASA INDUSTRI PENGKERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	60	SINGAPURA	900.000	23/01/2015
12	PT KINGSTONBINTAN MARINE SERVICES	JL NUSANTARA KM 23 KEC BINTAN TIMUR (KAWASAN FTZ BINTAN TIMUR)	JL NUSANTARA KM 23 KEC BINTAN TIMUR (KAWASAN FTZ BINTAN TIMUR)	JASA INDUSTRI PENGKERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	65	GABUNGAN NEGARA INDIA, SINGAPURA, MALAYSIA, INDONESIA	1.000.000	23/01/2015
13	PT. GCS OFFSHORE ENGINEERING	JL NUSANTARA KM 23 KEC BINTAN TIMUR (KAWASAN FTZ BINTAN TIMUR)	JL NUSANTARA KM 23 KEC BINTAN TIMUR (KAWASAN FTZ BINTAN TIMUR)	JASA INDUSTRI PENGKERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM DAN JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG	67	GABUNGAN NEGARA SINGAPURA, RR TIONGKOK	1.000.000	18/02/2015
14	PT FARAS SHIPBUILDING & SHIPREPAIRS	JL NUSANTARA KM 23 KEC BINTAN TIMUR (KAWASAN FTZ BINTAN TIMUR)	KAWASAN BINTANG INDUSTRI II LOT D1 NO 622 TANJUNG UNCANG - BATAM	JASA INDUSTRI PENGKERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM	45	GABUNGAN NEGARA SINGAPURA, INDIA	955.000.	08/04/2015

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

Investasi yang masuk di kawasan FTZ Bintan wilayah Kabupaten Bintan pada tahun 2015 adalah 8 PMDN dengan rencana investasi sebesar Rp.32.460.000.000 dengan membutuhkan Tenaga Kerja Indonesia adalah 429 Orang.sehingga total Perusahaan PMDN yang ada hingga desember 2015

adalah 17 PMDN dengan membutuhkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 1.095 Orang dengan rencana investasi Rp.565.867.654.031

Tabel 6.4 : Jumlah Perusahaan PMDN yang Berinvestasi di Bintan

1	PT BINTAN PELANGI RESOR	TELUK SEBONG	Kota Kapur Wisma BRC No. RT. 03 RW. 01 Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong	Hotel Bintang	Rp700,000,000
2	PT SARANA KERUING ABADI	BINTAN UTARA	JL. Lembah Sari RT. 012 RW. 02 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Rp12,530,000,000
3	PT PRIMA PETRO GEMILANG	BINTAN TIMUR	JL. Berek Motor Gg. Temu Lawak No. 132 RT. 001 RW. 008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Rp2,000,000,000
4	PT SINAR NIAGA MANDIRI	BINTAN TIMUR	Kp. Sei Datuk No. 12 RT.002 RW. 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	Rp1,000,000,000
5	PT BINTAN PELANGI RESOR	TELUK SEBONG	Kota Kapur Wisma BRC No. RT. 03 RW. 01 Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong	Hotel Bintang	700,000,000
6	PT SARANA KERUING ABADI	BINTAN UTARA	JL. Lembah Sari RT. 012 RW. 02 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	12,530,000,000
7	PT PRIMA PETRO GEMILANG	BINTAN TIMUR	JL. Berek Motor Gg. Temu Lawak No. 132 RT. 001 RW. 008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	2,000,000,000
8	PT SINAR NIAGA MANDIRI	BINTAN TIMUR	Kp. Sei Datuk No. 12 RT.002 RW. 005 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.	Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko	1,000,000,000

Sumber : BPMPD Kabupaten Bintan Tahun 2016

d. Kegiatan Investasi yang sudah dan sedang dikembangkan perkembangan Perusahaan Besar Dalam Tahap Pembangunan:

1. TREASURE BAY (PESONA LAGOI)

PT. LAGOI MANAGEMENT SERVICES

PT. BINTAN HOTEL UTAMA (THE CANOPY)

PT. PRIME VILLA INVESTMENT

2. LAGOI BAY

PT. BUKIT LAGOI VILLA (ALILLA RESORT)

PT. BBH INVESTMENT (SANCHAYA RESORT)

PT. STAR EAST SEJAHTERA GROUP (SWISSBELL HOTEL)

LAGOI BAY MALL

3. BINTAN UTARA (BERAKIT)

PT. BINTAN NORTH STARS RESORTS

PT. BERAKIT RESORT

PT. BINTAN BERAKIT RESORT

4. KAWASAN INDUSTRI GALANG BATANG (KEC. GUNUNG KIJANG)

PT. BINTAN ALUMINA INDONESIA

5. KECAMATAN BINTAN TIMUR

PT. SUN RESORT

Beberapa perusahaan di dalam KAWASAN TREASURE BAY

1. PT. PELANGI BINTAN INDAH
2. PT. BINTAN LEISURE RESORT VENTURES
3. PT.RESORT KIRANA BINTAN
4. PT. BINTAN HOTEL UTAMA
5. PT. RESORT DEVELOPMENT &MANAGEMENT BINTAN
6. PT. HOTEL MANAGEMENT BINTAN/LAGOI MANAGEMENT SERVICES
7. PT. TEASURE DEVELOPMENT SERVICES
8. PT. PRIME VILLA INVESTMENT

- Total investasi sampai dengan Triwulan I tahun 2014 untuk 8 perusahaan di kawasan pesona lagoi sebesar us\$ 42,5 juta (LKPM Smester I 2014)
- Total rencana investasi keseluruhan kawasan pesona lagoi sebesar US\$ 5,3 miliar.
- PT. Pelangi Bintan Indah sebagai pengelola dan perusahaan yang mengembangkan kawasan Treasure Bay (pesona lagoi) untuk tahap awal telah menginvestasikan sebesar (US\$ 21,7 juta) untuk pembangunan crystal lagoon sebagai bagian dari kawasan pariwisata terpadu pesona lagoi.
- Tahun 2014 terdapat 28 perusahaan PMA yang akan berinvestasi di kawasan Pesona Lagoi dengan total rencana investasi sebesar US\$.112.000.000,-

1) LAGOI BAY

a) PT. Stareast Sejahtera Group (SWISSBELL HOTEL)

- Merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berlokasi di Kawasan Pariwisata Lagoi, Lagoi Bay Lot V5 dan V6 Kecamatan teluk Sebong Kabupaten Bintan.
- Perusahaan bergerak dibidang Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Luas Tanah : 10.551 M2. Perusahaan berencana akan mendirikan hotel setara bintang 4 dengan kapasitas 196 (seratus sembilan puluh enam) kamar.
- Rencana Investasi Perusahaan di Kabupaten Bintan Sebesar Rp.200 miliar. Rencana penggunaan tenaga kerja sebanyak 200 orang. Progres pembangunan Perusahaan perusahaan sedang berjalan dan direncanakan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2015.

b) PT. BBH Investment (Sanchaya)

- Merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), lokasi proyek berada di Kawasan Pariwisata Lagoi, Lagoi Bay Kecamatan teluk Sebong Kabupaten Bintan.
- Perusahaan bergerak dibidang Jasa Akomodasi (cottage). Luas Tanah : 92.000 M2. Perusahaan berencana akan mendirikan Hotel/Cottage setara bintang 5 dengan kapasitas 60 (enam puluh) kamar. Rencana Investasi Perusahaan di Kabupaten Bintan Sebesar US\$ 20.000.000,- Rencana penggunaan tenaga kerja sebanyak 100 orang.
- Progres pembangunan Perusahaan perusahaan sedang berjalan dan direncanakan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2014.

c) PT. Bukit Lagoi Villa (Alilla)

- Merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), lokasi proyek berada di Kawasan Pariwisata Lagoi, Lagoi Bay Kecamatan teluk Sebong Kabupaten Bintan. Perusahaan bergerak dibidang Jasa Akomodasi (Cottage). Luas Tanah : 10 Ha (Cottage : 6 ha. Hotel : 4 Ha) Perusahaan berencana akan mendirikan Hotel/Cottage setara bintang

3dengan kapasitas hotel 40 (empat puluh) kamar, Cottage dan Residential cottage 30 kamar serta Rumah Mewah 15 unit.

- Rencana Investasi Perusahaan di Kabupaten Bintan Sebesar Rp.300 miliar penggunaan tenaga kerja sebanyak 340 orang. Progres pembangunan Perusahaan perusahaan sedang berjalan dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2014 dan akan mulai beroperasi pada awal tahun 2015

2) PT. Bintan Alumina Indonesia

- Merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) yang berlokasi di Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang Kabupaten Bintan
- Perusahaan bergerak dibidang Pengolahan dan Pemurnian Bijih Bouksit. Luas Lahan : 500 Ha (berdasarkan Izin Prinsip).
- Rencana Investasi Perusahaan di Kabupaten Bintan Sebesar Rp.7 Triliun Rupiah dengan Rencana Investasi awal sebesar 1 Triliun Rupiah (Izin Prinsip).
- Rencana penggunaan tenaga kerja sebanyak 4.000 orang. Progres pembangunan Perusahaan perusahaan sedang dalam pengurusan kelengkapan perizinan dan land clearing

a. RENCANA PROYEK

- Pembangunan PLTU (3 X 25 MW) secara bertahap dengan total kapasitas 2700 MW;
- Membangun fasilitas pemurnian/smelter Alumina yang secara bertahap ditingkatkan kapasitas produksinyasehingga mencapai total produksi sebesar 2,1 juta ton/tahun;
- Membangun fasilitas produksi aluminium elektrolit (INGOT), yang secara bertahap ditingkatkan kapasitas produksinyasehingga mencapai total produksi sebesar 1 juta ton/tahun;
- Pembangunanfasilitas produksi karbon anoda dengan kapasitas 530,000 ton karbon anoda;

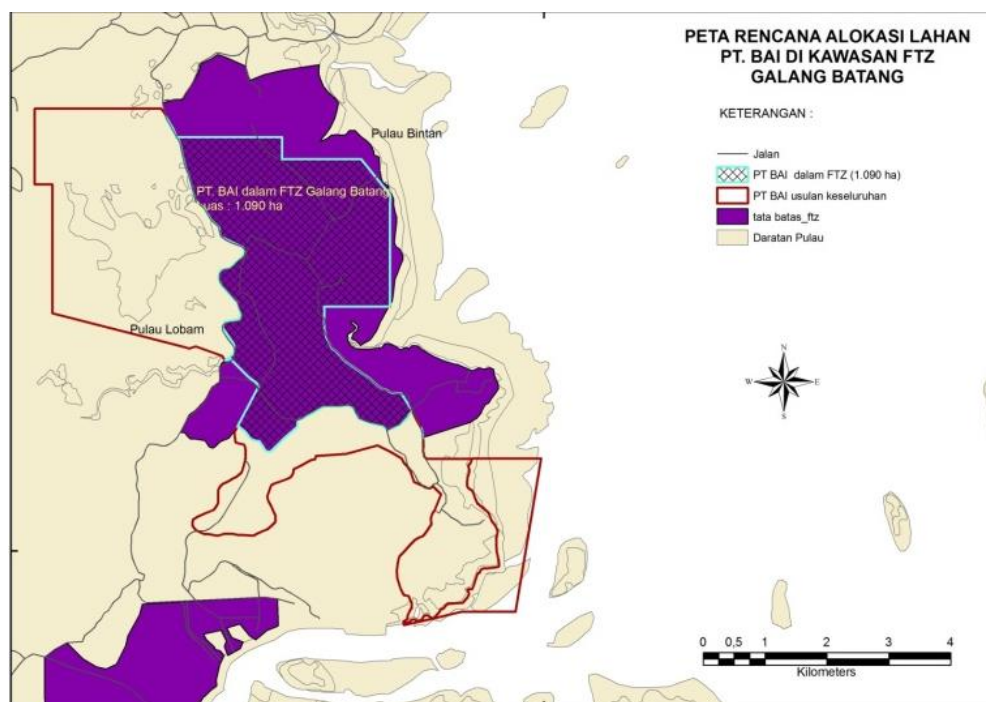
- pembangunan pelabuhan khusus (TUKS) dengan kapasitas 20 juta ton/tahun (50.000 dwt)
- Pembangunan fasilitas gas dengan kapasitas 160,000 kubik;
- Pembangunan zona perumahan dengan peruntukan 20 ribu orang.

b. Bentuk Lahan Bangunan

Luasan rencana kegiatan terpadu tahap I dan II meliputi site plan unit-unit kegiatan utama, yaitu :

Pabrik Pembuatan Alumunium yang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| a) Refinery Alumina | = 70,88 ha |
| b) Smelter Alumunium | = 181,27 ha |
| c) Tempat penimbunan red mud | = 163,05 ha |
| PLTU | = 219,28 ha |
| TUKS | = 175,87 ha |
| d) Reservoir (di luar tapak proyek) | = 166 ha |
| e) Kantor dan Perumahan | = 98,65 ha |



3) PT. Sun Resort

- Merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) dengan Negara asal China.
- Lokasi Proyek di Sei Enam Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- Perusahaan bergerak dibidang Wisata Agro dan Jasa Akomodasi (cottage).
- Luas Lahan :
 - ✓ Wisata Agro : 4 Ha.
 - ✓ Jasa Akomodasi (cottage/Hotel : 2 Ha.
- Rencana Awal Investasi Perusahaan di Rp. 19,5 Miliar.
- Rencana penggunaan tenaga kerja sebanyak 85 orang.
- Progres pembangunan Perusahaan perusahaan sedang dalam pengurusan kelengkapan perizinan dan land clearing.

Disamping itu, BP Bintan wilayah KabupatenBintan telah memperoleh nota kesepahaman nomor 54.bp. bintan / vii / 2013 nomor : pr.02/3/10/pi-13 tanggal 23 juli 2013, hal tersebut dalam rangka melakukan kerjasama pengembangan pelabuhan sei kolak kijang dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (persero)

Pihak PT. Pelindo I (Persero) telah mempelajari dan menganalisa data dimaksud dan PT. Pelindo I (Persero) telah mengeluarkan beberapa rekomendasi terhadap poin-poin yang layak untuk dikerjasamakan

- Perpanjangan Perkuatan Dermaga
- Pembangunan gedung untuk Container
- Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Pelabuhan
- Penambahan / Perluasan lapangan untuk Penumpukan Container
- Penyediaan alat bongkar muat untuk menaikkan dan menurunkan
- Penyediaan Head Truck (Kepala Truk)
- Penyediaan alat untuk menaikkan danmenurunkan Container

**IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAN TINDAK LANJUT PERAN
BP KAWASAN BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN**

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAN TINDAK LANJUT PERAN BP KAWASAN BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN		
LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL : KELEMBAGAAN.		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Pola Kelembagaan Yang Fleksibel	Belum adanya status kelembagaan BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.	Mendorong Ditetapkannya Status Kelembagaan BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.
Adanya Ruang Manajemen SDM Profesional	Belum Adanya Kebijakan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.	Menetapkan Manajemen Sumber Daya Manusia BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.
Dibolehkannya Rekrutmen Pegawai Profesional Non PNS	Belum ada Rekrutmen Pegawai Profesional Non PNS Yang Memadai.	Melakukan Rekrutmen Pegawai Profesional Non PNS
Pola Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Yang Terstandarisasi.	Belum Adanya Standar Operasi Prosedur Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Pelayanan.	Menyusun Standar Prosedur Operasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Pemberian Pelayanan.
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL : KEWENANGAN.		
Kewenangan Yang Luas	Belum adanya dukungan anggaran.	Melakukan advokasi anggaran dan Pelimpahan Wewenang.
	Belum adanya Rincian Pelimpahan Wewenang	
Keleluasaan Melakukan Pengelolaan	Kapasitas SDM yang Belum Mendukung.	Peningkatan Kualitas SDM.
Kesadaran Perlunya Pola Pengusahaan Yang Mudah dan Efisien.	Komunikasi Dengan Berbagai Pihak Belum Dilakukan Secara Maksimal	Komunikasi Untuk Mendorong adanya Terciptanya Pelayanan Yang Terpadu dan Mudah.
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAN TINDAK LANJUT PERAN BP KAWASAN BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN		
LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL : INFRASTRUKTUR		
Sudah Tersedia Beberapa Infrastruktur Pendukung	Belum Adanya Kerjasama dan Jaringan Antar Para Pihak.	Menjalin Kerjasama Dengan Para Pihak.
Meningkatnya Kebutuhan Pelayanan Kawasan FTZ.	Belum Adanya Strategi Menangkap Peluang Dengan Menyiapkan Infrastruktur.	Menyiapkan Insfrastruktur Sesuai Dengan Peluang.
IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS DAN TINDAK LANJUT PERAN BP KAWASAN BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN		
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL : PERDAGANGAN BEBAS		
Volume Perdagangan Antar Negara Meningkat	Kesiapan sarana dan prasarana, kebijakan dan manajemen belum memadai.	Mempersiapkan sarana, prasarana, kebijakan dan manajemen.
Kejenuhan Daya Tampung Pelabuhan di Sekitar Selat Malaka.	Daya Tarik dan Promosi kawasan belum Maksimal.	Melakukan promosi dan kerjasama dengan para pelaku bisnis internasional.

4.6. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Gangguan yang Terjadi

Kondisi keamanan dan ketenteraman serta ketertiban di Kabupaten Bintan selama tahun 2015 berjalan normal dan kondusif. Tidak ada terjadi gangguan yang bersifat anarkis, separatis, dan konflik berbasis SARA serta gangguan keamanan lainnya. Kondisi ini sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis.

b. SKPD yang menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menangani ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Bintan adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi

Berdasarkan Perda Kabupaten Bintan No.6 tahun 2012 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bintan dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 pegawai yang bertugas pada Satpol PP berjumlah 182 orang yang terdiri dari 170 orang PNS dan 12 orang Non PNS yang terdiri dari 5 orang PTT dan 7 orang Honorer. Sebagian besar PNS adalah Golongan II atau sebanyak 73,63%, Golongan I sebanyak 9,89%, sedangkan Golongan III sebanyak 8,79 %, dan Golongan IV hanya 1,10%, sebagaimana tercantum pada table berikut :

Tabel 6.5 : Jumlah Pegawai pada SATPOL PP Kabupaten Bintan Tahun 2015

No.	Status Kepegawaian/ Golongan	Jumlah		Keterangan
		Absolut	%	
1.	P N S	168		
	- Golongan IV	3		
	- Golongan III	20		
	- Golongan II	129		
	- Golongan I	16		
2.	PTT	5		
3.	Honorar	6		
	JUMLAH	179	100	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2015 total pagu anggaran kegiatan teknis (belanja langsung) setelah perubahan menjadi sebesar Rp.4.113.950.269,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.866.682.689,- atau 93,99%. Namun secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100%.

e. Penanggulangan dan Kendalanya

Pada tahun 2015 ada terjadi beberapa kali peristiwa gangguan kemanan, ketentraman dan ketertiban. Peristiwa-peristiwa tersebut belum bersifat SARA, anarkis, dan separatist. Gangguan dimaksud lebih dominan yang bersifatdemonstrasi/ unjuk rasa atau penyampaian aspirasi. Dalam penanggulangannya Satpol PP berperan mendukung tugas Polri dengan mengedepankan pendekatan persuasif sehingga demonstrasi/unjuk rasa berjalan damai dan tidak ada kendala dalam penanggulangannya.

f. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

(1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pengawasan dan Operasi Kantrantibum. dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.707.500,- dengan realisasi sebesar Rp.133.784.000,- (93,09%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya patroli menggunakan kendaraan dinas roda empat maupun kendaraan dinas roda dua. Hasil dari kegiatan ini adalah

dalam rangka mengawasi kondisi ketertiban masyarakat umum maupun dalam rangka operasi ketertiban yang meliputi seluruh kawasan Kabupaten Bintan dengan sasaran pada kawasan perkotaan (pasar dan pertokoan), fasilitas umum (taman kota, akau, pelabuhan, tempat keramaian lainnya), maupun sekitar jalan raya/umum serta tempat tertentu yang dirasa perlu dan berpotensi adanya gangguan. Operasi ini dengan melibatkan anggota Satpol yang berada di kantor/markas dan anggota di kecamatan, dengan prioritas pada tempat tujuan kegiatan masyarakat yang berpotensi terciptanya gangguan ketertiban umum.

- (2) Penertiban dan Pengamanan Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.287.500,- dan realisasi sebesar Rp.35.135.000,- (99,57%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penertiban dan pengamanan dilakukan terhadap pelaksanaan STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an) Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjaga kondisi ketertiban agar pelaksanaan kegiatan STQ berjalan dengan lancar dan sukses. Penertiban dan pengamanan dimulai sejak tahap persiapan, pada saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, termasuk pula saat pawai taaruf oleh seluruh kontingen kecamatan. Pelaksanaan STQ pada tanggal 5 s/d 7 April 2015 bertempat di Kecamatan Bintan Utara. Pengamanan dilaksanakan dengan melibatkan anggota Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian sejak H-2 sampai dengan H+1 terutama pada kondisi yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan STQ. Secara keseluruhan pelaksanaan STQ ini berjalan lancar dan tidak terdapat gangguan yang berarti yang mengganggu jalannya acara di lokasi tersebut.
- (3) Pengamanan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Acara Penting. dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.148.371.500,- (86,51%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penjagaan dengan melibatkan anggota Satpol keamanan dan ketertiban pada saat adanya kunjungan pejabat dan ketika penyelenggaraan acara penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sasaran dari pengamanan terhadap pejabat negara maupun pejabat daerah pada Tahun 2015 adalah pejabat pusat dan pejabat daerah serta pejabat luar negeri yang melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Bintan (sebagai tempat tujuan), antara lain : Wakil Presiden RI, Menteri Pariwisata, Menteri Perikanan, Menko Polhukam dan Anggota DPR RI. Pejabat daerah antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pj.Gubernur, Bupati Bintan, Wakil Bupati Bintan, dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan. Sedangkan acara penting yang menjadi sasaran kegiatan pengamanan ini antara lain mencakup Peresmian Bintan Expo, Pelantikan Pejabat Struktural, Bintan Fishing, Bintan Triathlon, Peresmian interkoneksi listrik, beberapa acara dan kegiatan terkait Pilkada Gubernur dan Bupati Tahun 2015, serta acara lainnya.

- (4) Pengamanan Kontingen pada STQ Tingkat Provinsi Kep. Riau, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.42.481.100,- (98,79%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengamanan terhadap kontingen/rombongan Kabupaten Bintan dalam rangka mengikuti STQ (Seleksi Tilawatil Qur'an) Tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang ke VI Tahun 2015 yang diselenggarakan di Ranai, Kabupaten Natuna pada tanggal 12 s/d 16 Mei 2015. Pengamanan dilaksanakan dengan melibatkan anggota Satpol PP dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian sejak persiapan keberangkatan dari Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang, pada

saat di kapal, pada pelaksanaan STQ di Ranai, hingga kepulangan rombongan kembali ke Kabupaten Bintan. Secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini berjalan dengan baik dan tanpa terdapat masalah yang berarti.

b. Permasalahan dan Solusi

1)Permasalahan

- a. Kurangnya frekwensi patroli kantrantibmas sehingga tidak bisa mencakup seluruh kawasan serta peristiwa gangguan ketertiban (selayaknya patroli minimal 3 kali sehari sesuai dengan SPM Kemendagri).
- b. Belum adanya peraturan yang dapat menjadi dasar hukum tindakan Satpol PP di lapangan seperti Perda tentang pengawasan objek vital dan Perbup tentang jam malam.

2)Solusi

- a. Melakukan usulan untuk penambahan frekwensi patroli dengan penyediaan anggaran dan kendaraan dinas roda 4 maupun roda2.
- b. Mengusulkan draft Perda dan Perbup dengan melakukan koordinasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan

(2) Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas POL PP

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.464.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.328.205.300,- (70,61%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas masyarakat perorangan maupun badan usaha terkait

dengan ketaatan mereka dalam memenuhi ketentuan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, antara lain legislasi perizinan, lokasi usaha, maupun dampak usaha terhadap masyarakat lain. Pengawasan dilakukan dengan cara patroli menggunakan kendaraan dinas dengan sasaran pada tempat usaha dan tempat umum, dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan anggota Satpol PP dan aparat/petugas instansi terkait seperti petugas kecamatan, dan petugas pada dinas/instansi teknis. Output kegiatan ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus tindak pelanggaran sampai dengan persidangan di pengadilan, dengan menyediakan biaya petugas pengawasan maupun biaya persidangan.

- (2) Pembinaan Jasmani dan Profesionalisme Aparatur, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.257.134.700,- dan realisasi sebesar Rp.256.540.000,- (99,77%). Output dari Kegiatan ini adalah terlaksanya pembinaan fisik/jasmani para anggota Satpol PP agar terlatih menghadapi gangguan pada berbagai situasi, baik secara perorangan maupun berkelompok sehingga lebih profesional dan sesuai dengan protap yang ditentukan dalam menangani dan berhadapan dengan kelompok masyarakat dalam rangka menjalankan tugas-tugas di lapangan. Lokasi pembinaan di Kantor Satpol PP Kabupaten Bintan dan kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan, dengan menyediakan makan dan minum kegiatan serta bantuan uang saku peserta kegiatan.
- (3) Pelatihan KORSIK, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.162.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.161.916.800,- (99,95%). Output dari Kegiatan ini adalah terlaksanya Pelatihan Korsik untuk meningkatkan kemampuan para anggota Satpol PP yang terlibat pada Korsik sehingga lebih terlatih sebagai pengiring

musik pada upacara resmi yang diadakan oleh pemerintah daerah. Keikutsertaan Korsik pada upacara resmi Tahun 2015 antara lain pada upacara peringatan hari kemerdekaan RI, serta hari besar lainnya. Hingga akhir tahun 2015 realisasi kegiatan memenuhi target yang ditentukan dengan hasilnya pelatihan untuk 20 orang anggota Korsik.

- (4) Pelatihan Marching Band dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.200.000,- dan realisasi sebesar Rp.203.959.000,- (96,57%). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan marching band ditujukan kepada anggota marching band yang terdiri dari remaja usia sekolah dan kuliah yang ada di Kabupaten Bintan sebanyak 60 orang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan aktivitas positif kepada para remaja dalam keikutsertaanya pada event kabupaten maupun provinsi. Tempat pelatihan dipusatkan di Kota Kijang dan peserta pelatihan tidak hanya dilatih dalam mengoperasikan alat tapi juga pembinaan mental dan disiplin dalam beraktivitas. Pelatih marching band didatangkan dari kalangan profesional yang berasal dari luar daerah (Jakarta).

b. Permasalahan dan Solusi

1)Permasalahan

- a. Belum adanya Peraturan Daerah Tentang K3 (Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan) yang semestinya menjadi produk hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi landasan bertindak di lapangan.
- b. Jumlah PPNS Bidang Pamong Praja masih sedikit.
- c. Belum memiliki sekretariat bersama dengan PPNS bidang lainnya.

1)Solusi

- a. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan untuk menyusun Ranperda K3 dan

mengusulkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2016.

- b. Mengusulkan tambahan anggaran untuk diklat PPNS bagi anggota yang telah memenuhi kriteria.
- c. Mengusulkan pembentukan Sekretariat PPNS berikut dengan biaya operasional-nya selama setahun.

(3) Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat

a. Pelaksanaan Program

- (1) Pemantapan, Pemantauan dan Pengamanan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.318.506.949,- dan realisasi sebesar Rp.318.506.949,- (100,00%). Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya rencana pemantapan bagi anggota linmas, pemantauan dan pengamanan Pemilu tahun 2015 pada 289 TPS. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 578 orang anggota Linmas yang melaksanakan pengamanan pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bintan dan dan Pemilu Kepala Daerah Gubernur Provinsi Kep. Riau pada tanggal 9 Desember 2015. Pengamanan di setiap TPS dilakukan oleh 2 orang anggota Linmas yang sebelumnya telah dilakukan sosialisasi maupun bimtek terkait pengamanan pada saat persiapan, hari H, maupun saat penghitungan suara setelah pemungutan.
- (2) Pengendalian Keamanan Lingkungan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.271.766.800,- dan realisasi sebesar Rp.265.547.700,- (97,71%). Output kegiatan ini adalah melaksanakan pembinaan kepada petugas poskamling di tingkat kelurahan/desa agar dapat bertindak secara benar dalam melakukan tugas dan juga memberikan bantuan pada beberapa poskamling berupa peralatan kelengkapan untuk 140 unit poskamling pada 10 kecamatan.

b. Permasalahan dan Solusi

1)Permasalahan

- a. Masih terdapat anggota Linmas yang belum sepenuhnya paham tentang prosedur/pola pengamanan Pemilu dan fungsi lainnya.
- b. Beberapa daerah belum memiliki poskamling yang memadai.

2)Solusi

- a. Mengusulkan kegiatan pelatihan bagi anggota Linmas dengan mendatangkan narasumber dari kementerian maupun instansi teknis terkait di dalam daerah (Provinsi Kepulauan Riau).
- b. Mengusulkan kegiatan pembangunan poskamling dan bantuan peralatan poskamling.